

[PENDEKATAN POLITIK UNTUK PUBLIC HEALTH DENGAN USULAN MEMASANGKAN JUMLAH KAMPUNG ODF DI WEBSITE PEMERINTAH DAERAH]

[Betty Siahaan]

[Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah]

Latar Belakang

1. Tingginya kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS) di Indonesia menunjukkan bahwa sanitasi belum baik.
2. Kabupaten Lampung Tengah terdapat 314 kampung dimana sebanyak 164 Kampung belum ODF.
3. Kemiskinan menjadi faktor determinan sosial kesehatan sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi sarana sanitasi dasar.
4. Program ODF tidak dapat dikelola puskesmas karena keterbatasan SDM.



Rekomendasi

1. Pemerintah daerah dapat membuat program bedah rumah dengan menggunakan APBD atau memanfaatkan CSR perusahaan yang ada di daerah.
 - Strategi tersebut berhasil dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan karena kriteria yang mendapat bantuan bedah rumah yaitu yang tidak mempunyai jamban sehat.
 - Program tersebut melibatkan Bupati, Dinas PU PR, DPRD dan pengerjaannya melibatkan masyarakat.



2. Pemerintah daerah seperti menyediakan toilet tiap rumah tangga dengan menggunakan dana desa.
 - Bila masyarakat BABS karena tidak mempunyai lahan, dana desa dapat digunakan membeli lahan dan dibuatkan jamban sehat. Program tersebut berhasil dilakukan di Nusa Tenggara Barat.
3. Membuat jamban komunal melalui dana desa yang pengerjaannya melibatkan masyarakat.

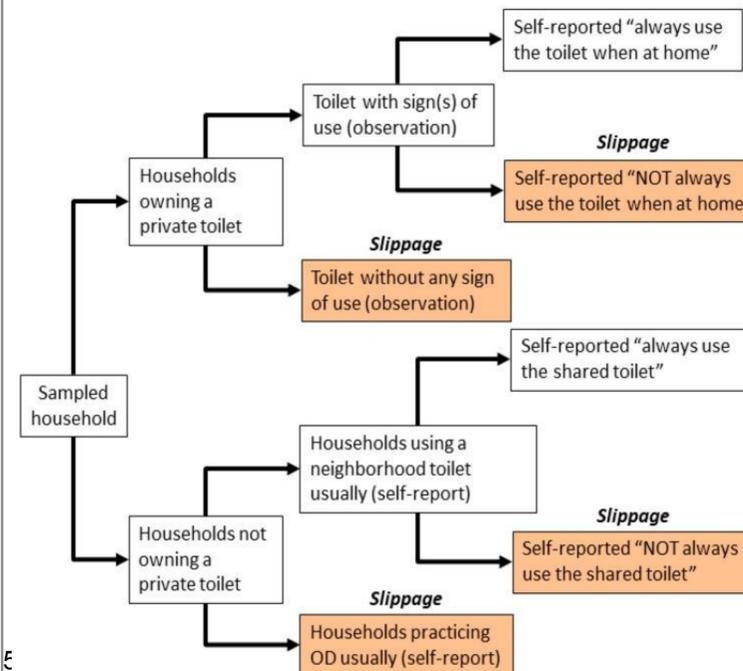


Hasil

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah dan Puskesmas melakukan advokasi ke Lembaga Pemasayarakatan dalam upaya mendukung keberhasilan program ODF.
 - Pemberdayaan warga binaan menghasilkan pembuatan 109 kloset dan didistribusikan kepada masyarakat.
2. Arisan Jamban (dengan membayar 50 ribu setiap bulan dalam setahun, maka peserta arisan yang memenangkan kocokan undian akan dibangun jamban sehat).
3. Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang belum menggunakan jamban sehat karena masyarakat menunggu bantuan dari pemerintah daerah.



4. Penggalangan komitmen antara dinas kesehatan dengan stakeholders politik (DPRD, Bappeda, Dinas PU PR, BPMK) terkait dukungan dalam keberhasilan program ODF.
 - Dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah
 - Membentuk Kelompok Kerja (PokJa) sanitasi
 - Gerakan stop BABS lembaga mitra, pihak swasta, masyarakat
 - Kegiatan : pemicuan (melibatkan masyarakat untuk mencari penyebab BABS, memetakan masalah BABS, mencari solusi dari permasalahan tersebut) dan penguatan kelembagaan



dukungan Program kampung ODF dan memasang program tersebut di website Pemerintah Daerah.

Kesimpulan

1. Masalah BABS tidak bisa dianggap remeh, karena perilaku BABS sumber dari berbagai sakit penyakit.
2. Perlu dilakukan revolusi toilet untuk menyelesaikan masalah BABS dengan penguatan kelembagaan, melibatkan stakeholders politik dan pemberdayaan masyarakat.

Referensi

1. Lapas Gunung Sugih Produksi Closet. Retrieved from <http://www.ditjenpas.go.id/peduli-kesehatan-masyarakat-lapas-gunung-sugih-produksi-closet/>
2. Kementerian Kesehatan RI. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Retrieved from https://peraturan.bkpm.go.id/dih/userfiles/batang/Permenkes_3_2014.pdf
3. Zayyinil, R. (2018). Analisis Pelaksanaan Program Open Defecation Free (ODF) dan Peran Stakeholders di Kabupaten Bojonegoro, (May). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/325313033_ANALISIS_PELAKSANAAN_PROGRAM_OPEN_DEFECATION_FREE_ODF_DAN_PERAN_STAKEHOLDERS_DI_KABUPATEN_BOJONEGORO Lembaga Pemasayarakatan Kelas III Gunung Sugih. (2018). Peduli Kesehatan Masyarakat,